

## Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas berstandar Internasional

Sri Uchtiawati<sup>1</sup>, Irwani Zawawi<sup>2</sup>

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gresik

e-mail: <sup>1</sup>sri.uchtiawati@gmail.com; <sup>2</sup>irwanizawawi@ymail.com

**Abstract:** This research focuses on the enactment of Operational Procedures Standards (SOP) to be able to provide certainty in implementing education system in International standardized Senior High Schools. Based on the Government Regulation 19 of 2005, formal and non-formal education units required to perform quality assurance. These provisions can be implemented in the mechanism of action. Operational Procedures Standard is a system that shows how policy makers based on applied standards to this school carry out the plot. Operational Procedures Standard becomes a measure of the objective achievement. International Standard School (SBI) is a high school level, which must be able to produce qualified and competitive graduates both in domestic and overseas. International Standard School, which is studied, has established 'quality' under the provisions of the National Education Standards Board. However, the mechanism of quality achievement has not based on the clear model. This research was conducted with field studies and documentation, which then can be determined Operational Procedures Standards 'model' for International Standard School. The specification of mechanism includes Content Standards/ Curriculum, Standards of Learning Process, Graduates Competence Standards, Standards of Teachers and Education Personnel, Infrastructure Standards, Management Standards, Financing Standards, Educational Assessment Standards. Based on this standard, then, conceptual procedure is defined, which is a step of logical instructions towards the desired process. As a follow-up, a trial is conducted to achieve the objectives efficiently and effectively. Operational Procedures Standard is equipped with description, a manual procedures and work instructions, then, evaluated so it becomes continuous quality improvement

**Keywords:** quality assurance, Standard Operating Procedure

**Abstrak:** Penelitian ini menitik beratkan pada pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk dapat memberikan kepastian dalam melaksanakan sistem pendidikan disekolah menengah atas berstandar internasional. Berdasarkan PP 19 tahun 2005, satuan pendidikan jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu. Ketentuan itu dapat dilakukan dalam bentuk mekanisme kerja. SOP merupakan suatu sistem yang menunjukkan bagaimana alur yang dilakukan oleh pembuat kebijakan berdasarkan standar yang diterapkan pada sekolah tersebut. SOP ini menjadi ukuran pencapaian tujuan. Sekolah Berstandar Internasional (SBI), merupakan jenjang sekolah menengah atas yang harus mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, dan berdaya saing baik dalam negeri, maupun antar negara. SBI yang diteliti telah menetapkan 'mutu' berdasarkan ketentuan dari BSNP. Tetapi mekanisme pencapaian mutu masih belum didasarkan pada model yang jelas. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan dan dokumentasi, yang kemudian dapat ditentukan 'model' SOP bagi SBI. Mekanisme yang ditentukan, meliputi: Standar Isi/Kurikulum, Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan. Berdasarkan standar ini kemudian ditetapkan konseptual prosedur yang merupakan langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju proses yang dikehendaki. Sebagai tindak lanjut dilakukan uji coba untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. SOP dilengkapi dengan deskripsi berupa manual prosedur dan instruksi kerja, kemudian dievaluasi sehingga menjadi peningkatan mutu berkelanjutan.

**Kata kunci:** penjaminan mutu, Standar Operasional Prosedur.

Mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang bekepentingan memperoleh kepuasan. PP 19, tahun 2005 pasal 91, menyatakan bahwa: Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Lembaga pendidikan seharusnya menetapkan standar mutu, yang tidak hanya dinyatakan pada ketentuan pengakuan terakreditasi, tetapi

juga harus dilengkapi dengan suatu mekanisme yang jelas bagaimana mutu lembaga pendidikan itu direalisasi sesuai dengan mekanisme yang jelas.

Masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan saat ini sangat memperhatikan mutu lulusan lembaga pendidikan khususnya sekolah menengah atas, yang merupakan jalur pendidikan formal, dan menjadi tolok ukur untuk mampu melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi. Mereka mengharapkan mampu bersaing didalam negeri, maupun dengan negara lain, pada era globalisasi. Tuntutan mutu pada lingkup pendidikan merupakan faktor penting. Untuk memenuhi harapan itu, maka diperlukan sistem penjaminan mutu yang terorganisir secara benar, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Batasan dalam penelitian penerapan penjaminan mutu pada sekolah berstandar internasional, yang merupakan sekolah nasional di Indonesia dengan menggunakan standar internasional yakni dalam melakukan proses belajar dan pembelajarannya disekolah ini ditekankan pada pengembangan dan inovasi, eksperimentasi untuk memacu ide-ide baru. ini ditekankan pada penentuan SOP, melalui studi lapangan untuk menghasilkan suatu data realisasi pelaksanaan penjaminan mutu, dan dilengkapi dengan dokumen yang ada.

Berdasarkan hal ini maka diterapkan dengan metode pendekatan: segitiga layanan. Model ini ditekankan pada hubungan antara layanan dengan sumber daya manusia. Model tersebut terdiri dari tiga elemen, yaitu strategi layanan, sumber daya manusia yang memberikan layanan dan sistem layanan (Albrecht & Zemke dalam Rochaety, 2005),

Dari pendekatan ini, maka strategi layanan merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pengelola institusi dalam menjamin mutu, dan yang dihasilkannya adalah berbagai kebijakan. Sumber daya manusia yang memberikan layanan, dalam pelaksanaannya terdapat dua katagori yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, dimana peran secara administrasi dilakukan terpadu antara dua katagori sumber daya manusia tersebut, dan sistem layanan, inilah yang menjadi sistem tersendiri pada penjaminan mutu, karena berdasarkan suatu kebijakan yang dilakukan dapat melahirkan suatu sistem yang berbeda. Untuk itu pencapaian standar dari BSNP, harus dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur yang meliputi: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; 8) standar penilaian pendidikan.

Berdasarkan standar diatas, maka masih harus ditetapkan suatu diskripsi, Manual Prosedur, dan instruksi kerja sebagai kelengkapan, sebab SOP dari suatu kebijakan akan mejadi jelas mekanisme yang harus dilakukan ketika didukung oleh manual prosedur, sekalipun tingkat rincian dapat berbeda tergantung pada kerumitan/kompleksitas, kegiatan dan metode yang digunakan serta ketrampilan yang dimiliki, dan selanjutnya adalah adanya instruksi kerja yang merupakan penjelasan kinerja semua pekerjaan.

SOP adalah pedoman atau ketentuan yang menjadi suatu acuan untuk melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator tehnis, administratif dan prosedural sesuai dengan ketentuan kerja yang harus dilakukan pada bidang tersebut. SOP merupakan gambaran serta langkah-langkah kerja yang diperlukan dalam melaksanakan tugas untuk pencapaian tujuan yakni standar mutu yang ditentukan.

Fungsi ditetapkannya SOP adalah membentuk sistem kerja & alur kerja yang jelas dan teratur, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Perumusan SOP menjadi relevan karena dapat dipergunakan sebagai tolok ukur ketika melakukan penilaian tujuan institusi secara efisien dan efektif. Hal ini karena SOP pada dasarnya ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, dan merupakan standar yang baku. Sedangkan untuk mewujudkan penjaminan mutu di SBI penerapan yang dapat dilakukan diantaranya melalui tahap-tahap pelaksanaan yang meliputi tiga tahap yaitu: merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi.

## **Metode Penelitian**

Metode pengambilan data dilakukan dengan cara: 1) *Partisipatory Action Research* (PAR) dimana pendekatan ini dipergunakan untuk metode observasi dan wawancara secara terstruktur dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu secara individu ketika data yang diperlukan terkait dengan informan inti dan juga wawancara secara kelompok ketika terkait dengan informasi yang memerlukan beberapa pandangan dilokasi penelitian. Mengingat dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu Prosedur Kerja, yang dilengkapi dengan diskripsi dan standar mutu, maka wawancara dan observasi diarahkan pada: 1) mengembangkan pemahaman tentang mutu pendidikan

yang terukur; 2) menggali kondisi yang sudah menjadi rutinitas sekolah dalam mengelola pendidikan disekolah tersebut; 3) memperhatikan apakah pencapaian mutu yang telah dilakukan sekolah didasarkan atas suatu prosedur yang baku, sehingga ada kepastian yang dapat dijadikan tolok ukur; 4) mencermati bagaimana dapat melakukan suatu prosedur operasional yang terstandar, dengan jelas sehingga pendiskripsian menjadi bagian pemahaman yang harus tertuang secara formal; 5) Memperhatikan bagaimana standar yang akan dicapai oleh sekolah berstandar internasional ini, sudahkah terorganisir dan menjadi kelengkapan penjaminan mutu sekolah; 6) Mengkaji secara teoritis, berdasarkan literatur, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang relevan untuk mendapatkan suatu landasan tentang sistem penjaminan mutu lembaga pendidikan. 2) *Focus Group Discussion* merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui diskusi bersama oleh beberapa peserta dengan menggunakan tema atau fokus, dimana pada penelitian ini pembahasan tentang dokumen yang berupa hasil akreditasi dibahas bersama untuk menyesuaikan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yayasan, *stakeholders*.

Dari data yang telah diperoleh melalui studi lapangan kemudian mengkaji berdasarkan teori yang berkaitan dengan penjaminan mutu, serta peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara. Hasil yang dianalisis: 1) data yang merupakan suatu dokumen kebijakan pengelolaan sekolah, pembagian tugas, beserta wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bidang; 2) Angket yang dilakukan oleh peneliti dibahas/dianalisis bersama pemilik proses disekolah masing-masing dari pembahasan ini didapatkan suatu 'kepentingan penetapan prosedur kerja; 3) wawancara mendalam sampai pada 'orang kunci' untuk memperkuat bagaimana mekanisme Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya dilakukan di sekolah tersebut; 4) menentukan diskripsi dari standar Operasional (SOP) sekolah yang telah diteliti berdasarkan data; 5) menganalisis ketepatan standar mutu sesuai dengan sekolah masing-masing.

## Hasil Penelitian

Dari Sekolah yang ditentukan untuk melakukan penetapan standar operasional prosedur (SOP), diidentifikasi dengan nomor dan kode sebagai berikut: Penetapan BNSP, tentang standar yang dijadikan pedoman adalah: 1) Standar Isi/ Kurikulum; 2) Standar Proses Pembelajaran; 3) Standar Kompetensi Lulusan; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan; 8) Standar Penilaian Pendidikan

Dan dari ketentuan ini kemudian dijabarkan menjadi bagian-bagian dengan suatu 'model' (model disini adalah suatu teknik untuk mengorganisasikan sistem dan mendokumentasikan struktur dan data yang ada pada seluruh sistem proses yang nantinya diterapkan) sebagai berikut:

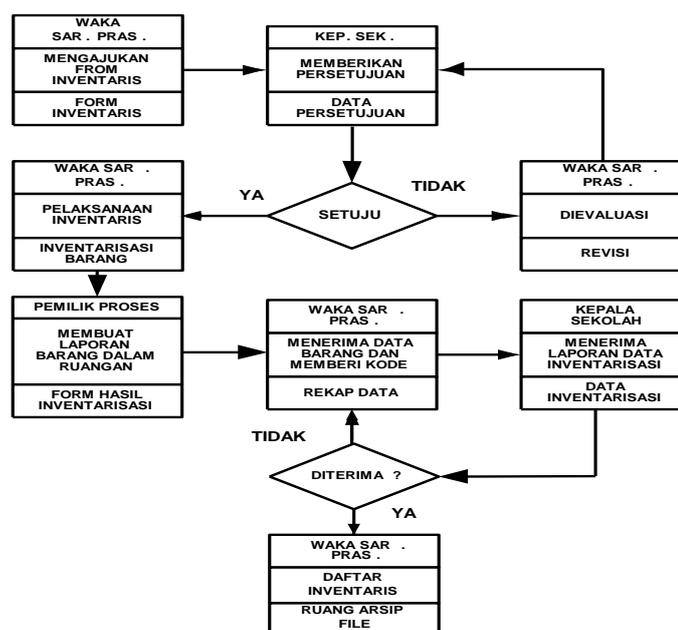
Dari penjabaran ini setiap sekolah dapat mengembangkan berdasarkan tujuan masing-masing, sehingga kelengkapan merupakan suatu spesifikasi tersendiri. Dari penjabaran standar, kemudian ditentukan SOP untuk masing-masing indikator dengan memperhatikan tahap-tahap penyusunan SOP, yaitu: 1) melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, dimana pada tahap ini merupakan suatu kegiatan untuk melakukan identifikasi fungsi utama dalam pekerjaan yang dilakukan disekolah, mengingat pekerjaan yang dilakukan merupakan suatu sistem sehingga komponen-komponen pendukung sistem dituliskan; 2) analisis tugas, merupakan telaah yang dilakukan secara mendalam tentang tugas dari komponen yang dilakukan, sehingga dapat berupa suatu kejelasan bagaimana seharusnya pekerjaan itu dilakukan; 3) analisis prosedur kerja, merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Perumusan SOP ini menjadi relevan, karena dapat menjadi tolok ukur dalam menilai tujuan institusi secara efektif dan efisien, karena langkah-langkah sejumlah interaksi logis untuk menuju pada suatu sistem yang dikehendaki dapat dilakukan dengan suatu sistem, dan Standar Operasional Prosedur ini dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mempermudah pembuatan suatu SOP dalam suatu institusi, dalam hal ini pada suatu lembaga pendidikan, maka hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) identifikasi terlebih dahulu siapa yang bertanggungjawab dalam komponen standar tersebut, dengan berorientasi pada tujuan; 2) buatlah dengan alur yang jelas, sederhana gampang dimengerti, dan dilakukan, serta dievaluasi. Dari Operasional prosedur, diperlukan suatu diskripsi penjabaran, yang nantinya menjadi kelengkapan pada suatu sistem penjaminan mutu. Penjabaran dalam penetapan SOP dapat dilihat pada tabel 1 dan grafik 1:

Tabel 1: Penjabaran dalam penetapan SOP

No	Uraian	Model 1	Model 2
1	Isi/ Kurikulum	Kerangka Dasar Kurikulum, Kalender Pendidikan	Kerangka Dasar Kurikulum, Kalender Pendidikan
2	Proses Pembelajaran	Administrasi Pembelajaran, Pengembangan Silabus, Pembuatan RPP, Proses Belajar Menajar	Pengembangan Silabus, Pembuatan RPP, Proses Belajar Mengajar, Supervisi Guru
3	Kompetensi Lulusan	Ujian Sekolah, Koreksi Ujian Sekolah, Kelulusan Peserta Didik	Ujian Sekolah, Koreksi Ujian Sekolah, Kelulusan Peserta Didik
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Seleksi Penerimaan Guru - Standar Kualifikasi Guru: Cuti Guru, Pelatihan Guru dan Karyawan, Kehadiran Guru. - Supervisi Guru - Rekrutmen Pegawai	Standar Kualifikasi Guru, Pelatihan Guru dan Karyawan, Kehadiran Guru
5	Sarana dan Prasarana	Inventarisasi Barang, Pemeliharaan Sarpras	Inventarisasi Barang, Pemeliharaan Sarpras
6	Pengelolaan	a. Kesiswaan - Penerimaan Peserta Didik Baru : Pendaftaran Peserta Didik baru, Daftar Ulang. - Penanganan Peserta Didik Bermasalah - Kehadiran Peserta Didik - Kegiatan Ekstrakurikuler b. Humas : Pembentukan Alumni, Menjalin Kemitraan	a. Kesiswaan: Penerimaan Peserta Didik Baru, Penanganan Peserta Didik Bermasalah, Kehadiran Peserta Didik, Kegiatan Ekstrakurikuler. b. Humas: Pembentukan Alumni, Menjalin Kemitraan, Pembentukan Komite Sekolah
7	Pembiayaan	Penyusunan APBS, Penentuan Biaya SPP	Penyusunan APBS
8	Penilaian	UTS/UKK	UTS/UKK



Grafik 1: Prosedur SOP

## Simpulan

Sebagai lembaga pendidikan formal, baik yang dikelola oleh negara, maupun oleh swasta diharuskan melakukan penjaminan mutu yang secara eksternal melalui Badan Akreditasi Sekolah, maupun secara internal yang dilakukan oleh sekolah sendiri, untuk merealisasi dan bagaimana penerapan mutu yang telah dinyatakan dalam status terakreditasi sekolah, sedangkan bidang yang harus distandarkan sesuai dengan ketentuan dari BSNP, atau melebihi, sedangkan untuk melakukan standar yang telah ditentukan tersebut dilakukan melalui pembuatan standar operasional prosedur (SOP), sehingga ada kepastian cara yang ditempuh dan dalam penelitian ini nantinya dilakukan melalui uji coba, sampai pada satu siklus, sehingga dapat terukur pada bagian mana/bidang apa yang tidak dapat dilakukan atau standar yang ditetapkan tidak dapat memenuhi prosedur, dengan demikian Jaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah dapat terealisasi, dan tidak hanya menjadi simbol, tetapi dapat merupakan suatu pengembangan mutu berkelanjutan 'kaizen'.

## Saran

Sekolah yang telah mendapat pengakuan mutu, baik secara internal, maupun eksternal, hendaknya dapat menentukan standar operasional (SOP) secara baku, dan disesuaikan dengan ketentuan dari BSNP, sehingga dapat memudahkan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan, yang nantinya dapat menjadi suatu tolok ukur pencapaian tujuan.

1. Sekolah yang terakreditasi, hendaknya dapat menentukan diskripsi standar operasional kerja (SOP) dan membuat Manual Prosedur, serta dilengkapi dengan Instruksi kerja.
2. Sekolah melalui mekanisme yang telah ditentukan dapat menentukan tahap-tahap pelaksanaan jaminan mutu sebagai berikut: yaitu: *plan* (merencanakan), *do* (melaksanakan), dan melakukan tahap *evaluation* (mengevaluasi), secara berkelanjutan.

## Rujukan

- James, I. Gibson dkk. (1997). *Organisasi dan Manajemen; Perilaku, struktur dan Proses*, Jakarta: Erlangga.
- Gazpers, V. (2003). *Total Quality Management*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kamariah, A., dan Triatna, C. (2005). *Vesionary Leadership, menuju sekolah efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suardi, R. (2004). *Sistem Manajemen Mutu ISO 9000-2000*. Jakarta: PPM.
- Undang-Undang Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara.